

Peran Hukum dalam Pengembangan Pedesaan Pembangunan Industri Kecil di Pedesaan

Akbar Nur Rokhim¹ Jovindi Fernando Kusniawan² Muhamat Hafis³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: akbarnurrokhimm@gmail.com¹ jovindipors@gmail.com² hafissarjani@gmail.com³

Abstrak

Kasus "Penegakan Peraturan Lingkungan dalam Industri Kecil di Pedesaan" menggambarkan situasi di sebuah desa kecil di Indonesia di mana terdapat industri kecil pengolahan makanan tradisional, khususnya industri tahu, yang menjadi pendorong ekonomi lokal. Namun, keluhan masyarakat terkait pembuangan limbah cair berbahaya ke sungai oleh industri tahu menimbulkan perhatian. Pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup setempat menemukan bahwa perusahaan tahu tersebut melanggar peraturan lingkungan dengan tidak memiliki izin dan tidak mematuhi standar pengelolaan limbah. Peran hukum menjadi krusial dalam penyelesaian kasus ini. Pemerintah desa memberikan peringatan kepada pemilik industri tahu untuk mematuhi peraturan lingkungan dan memperbaiki pengelolaan limbah. Jika pelanggaran berlanjut, tindakan hukum lebih lanjut seperti sanksi administratif atau proses hukum dapat diambil. Kasus ini menyoroti pentingnya peran hukum dalam mengawasi dan mengatur industri kecil di pedesaan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tepat, diharapkan industri kecil di pedesaan dapat tumbuh secara berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Peraturan Lingkungan dalam Industri Kecil di Pedesaan

Abstract

The "Enforcement of Environmental Regulations in Rural Small Industries" case illustrates a situation in a small village in Indonesia where traditional food processing small industries, particularly tofu industries, are a driving force of the local economy. However, complaints from residents regarding the discharge of hazardous wastewater into the river by the tofu industries have raised concerns. The village government and the local environmental agency found that the tofu companies were violating environmental regulations by not having permits and not complying with waste management standards. The role of law becomes crucial in resolving this case. The village government issued a warning to the tofu industry owners to comply with environmental regulations and improve waste management. If the violations continue, further legal action such as administrative sanctions or legal proceedings may be taken. This case highlights the importance of the role of law in overseeing and regulating rural small industries in order to maintain environmental sustainability and community well-being. With proper law enforcement, it is hoped that rural small industries can grow sustainably in accordance with applicable regulations.

Keywords: Enforcement of Environmental Regulations in Rural Small Industries



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di sebuah desa kecil di Indonesia, terdapat sejumlah industri kecil yang bergerak dalam sektor pengolahan makanan tradisional. Salah satu industri kecil tersebut adalah sebuah usaha tahu yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, muncul keluhan dari sebagian masyarakat sekitar terkait limbah cair yang dibuang oleh industri tahu tersebut ke sungai lokal. Limbah cair tersebut diduga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah desa bersama dengan dinas lingkungan hidup setempat kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa industri tahu tersebut melanggar

peraturan lingkungan yang berlaku. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan dan tidak mematuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan. Dalam kasus ini, peran hukum sangat penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah desa kemudian memberikan peringatan kepada pemilik usaha tahu untuk mematuhi peraturan lingkungan dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan limbah. Jika pelanggaran terus berlanjut, pemerintah setempat dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti memberikan sanksi administratif atau bahkan menempuh jalur hukum. Kasus ini mencerminkan pentingnya peran hukum dalam mengawasi dan mengatur aktivitas industri kecil di pedesaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan penegakan hukum yang tepat, diharapkan industri kecil di pedesaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Industri kecil sesungguhnya bisa menjadi jembatan dalam pengembangan pendapatan dan penampungan tenaga kerja di pedesaan serta untuk mensejajarkan perannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa perkembangan industri kecil selama ini belum mampu menyamai laju pertumbuhan tenaga kerja, tetapi setidaknya industri kecil telah menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat banyak untuk menciptakan lapangan kerja.

Dengan berkembangnya industri kecil, tentu saja akan mengakibatkan keanekaragaman produk dan hasil lainnya yang menyebabkan berubahnya pola konsumsi dalam masyarakat di pedesaan. Apabila sebelumnya konsumsi awalnya terbatas pada beberapa jenis barang saja, tetapi setelah industri kecil berkembang, pola konsumsi masyarakat desa pun menjadi beranekaragam sesuai dengan selera dan produk yang dihasilkan. Keanekaragaman hasil industri kecil di masyarakat desa mengakibatkan turunnya harga-harga barang konsumsi akibat terjadinya persaingan yang ketat dan turunnya harga-harga tersebut akan menguntungkan para konsumen yang berekonomi lemah atau masyarakat kecil, yaitu karena dapat terjangkau apabila ingin mengkonsumsi barang-barang tersebut. Masyarakat pedesaan memiliki hak fundamental untuk hidup sejahtera dan mandiri. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, dengan landasan utama berupa perlindungan hukum.

Hak atas tanah, sumber daya alam, pekerjaan, dan pendidikan merupakan kunci bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepastian hukum atas hak-hak ini akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desa. Perlindungan hukum membuka peluang pengembangan industri kecil di pedesaan secara berkelanjutan. Industri kecil ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rumusan Masalah: Bagaimana peran hukum dalam mendorong pengembangan pedesaan dan industri kecil di pedesaan? Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum dalam pengembangan industri kecil di pedesaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yurdis normative (normatif law research). Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pengembangan pedesaan dan industri kecil di pedesaan, peran hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Beberapa peran hukum dalam hal ini meliputi:

1. **Perlindungan Hukum:** Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat pedesaan, termasuk hak atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk pengembangan industri kecil di pedesaan;
2. **Regulasi dan Kebijakan:** Hukum digunakan untuk merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri kecil di pedesaan, seperti peraturan terkait izin usaha, pajak, dan perlindungan lingkungan;
3. **Penyelesaian Sengketa:** Hukum juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks pengembangan pedesaan dan industri kecil, baik antara masyarakat lokal maupun dengan pihak lain seperti investor atau pemerintah;
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui hukum, masyarakat pedesaan dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pedesaan dan industri kecil, serta mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi;
5. **Penegakan Hukum:** Hukum juga berperan dalam menegakkan aturan dan ketertiban dalam pengembangan pedesaan dan industri kecil, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

Dan hukum memiliki peran untuk melindungi berbagai hak-hak dari masyarakat pedesaan. Beberapa Hak atas Tanah hak yang dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

1. **Hak atas Tanah:** Hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat pedesaan, termasuk hak kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan;
2. **Hak atas Sumber Daya Alam:** Masyarakat pedesaan memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti air, hutan, dan hasil pertanian, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan;
3. **Hak Ketenagakerjaan:** Hukum melindungi hak-hak tenaga kerja di industri kecil di pedesaan, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi;
4. **Hak Partisipasi:** Masyarakat pedesaan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pedesaan dan industri kecil, serta mendapatkan akses yang adil terhadap informasi, peluang ekonomi, dan pelayanan publik;
5. **Hak Asasi Manusia:** Hukum juga melindungi hak asasi manusia masyarakat pedesaan, termasuk hak atas kehidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat serta berserikat;
6. **Hak Adat dan Budaya:** Hukum mengakui dan melindungi hak-hak adat dan budaya masyarakat pedesaan, termasuk hak atas warisan budaya, kepercayaan, dan praktik tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas lokal.

Wewenang, hak dan kewajiban desa tersebut memunculkan banyak harapan, tantangan juga kekhawatiran yang bermuara pada tuntutan terhadap meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Wewenang, hak dan kewajiban desa memiliki dimensi yang luas terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan berbagai aspek yang melingkupinya, seperti: keuangan dan kekayaan desa, perencanaan dan anggaran desa, kebijakan desa, pelayanan desa, kepemimpinan kepala desa, kelembagaan dan perangkat desa, pemberdayaan masyarakat desa, kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, dan aspek lain yang relevan. Problemnya adalah terdapat sinyalemen yang menunjukkan bahwa beban pemerintah desa sangat berat untuk melaksanakan amanat undang-undang desa jika melihat berbagai problematika dan kondisi pemerintahan desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya. Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kebijakan penting dan fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran industri kecil tahu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Industri kecil tahu mampu berperan terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kalisari. Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi pekerjaan, pendapatan dan tingkat pendidikan.
 - a. Keberadaan industri Kecil tahu dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga menyebabkan di Desa Kalisari terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Kalisari itu sendiri. Industri kecil tahu juga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di Desa Kalisari karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Industri kecil tahu juga dapat menumbuhkan semangat wirausaha bagi masyarakat Desa Kalisari sehingga semakin banyak jumlah pengrajin tahu.
 - b. Industri kecil tahu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kalisari yang menjadi pengrajin tahu. Keuntungan yang didapatkan menjadi pengrajin tahu mampu merubah keadaan ekonomi keluarga menjadi membaik. Berubahnya keadaan ekonomi keluarga menyebabkan masyarakat mampu merubah gaya hidup mereka dengan penghasilan yang besar sehingga tingkat konsumsi akan barang maupun jasa akan meningkat baik itu untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.
 - c. Industri kecil tahu mampu meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di masyarakat karena terjadinya peningkatan pendapatan sehingga para pengrajin mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan angka lulus sekolah di Desa Kalisari.
2. Industri kecil tahu juga berperan terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Kalisari. perubahan yang terjadi diantaranya:
 - a. Perubahan nilai-nilai sosial yaitu meningkatnya nilai-nilai kekeluargaan antar pengrajin tahu.
 - b. Perubahan sikap yaitu meningkatnya sikap kreatif dan inovatif, dan sikap peduli lingkungan para pengrajin tahu.
 - c. Perubahan pola perilaku masyarakat diantaranya yaitu meningkatnya rasa kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus "Penegakan Peraturan Lingkungan dalam Industri Kecil di Pedesaan" menunjukkan pentingnya peran hukum dalam mengawasi dan mengatur aktivitas industri kecil untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus ini, penegakan hukum menjadi langkah krusial untuk menyelesaikan masalah limbah berbahaya yang dihasilkan oleh industri tahu di desa kecil Indonesia. Tindakan pemerintah desa dalam memberikan peringatan dan kemungkinan sanksi hukum jika pelanggaran terus berlanjut merupakan langkah yang tepat dalam menegakkan peraturan lingkungan. Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mejadi lebih baik dari sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik. Berbagai pembangunan dari segi fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan sampai kepada pedesaan. Sedangkan pembangunan dari segi non fisik berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat secara merata masih dapat dikategorikan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari angka kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat baik di tingkat kota maupun pedesaan.

Saran: Pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup setempat perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri kecil di pedesaan untuk mencegah pelanggaran lingkungan yang merugikan. Pemilik industri kecil, seperti usaha tahu, harus mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan mengelola limbah dengan baik untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan dalam pemantauan aktivitas industri kecil untuk memberikan informasi jika terjadi pelanggaran lingkungan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan perlu ditingkatkan agar pemilik industri kecil lebih sadar akan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus serupa dapat dihindari di masa depan dan industri kecil di pedesaan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup setempat perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri kecil di pedesaan untuk mencegah pelanggaran lingkungan yang merugikan. Pemilik industri kecil, seperti usaha tahu, harus mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan mengelola limbah dengan baik untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Masyarakat sekitar juga perlu dilibatkan dalam pemantauan aktivitas industri kecil untuk memberikan informasi jika terjadi pelanggaran lingkungan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan perlu ditingkatkan agar pemilik industri kecil lebih sadar akan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan masyarakat tersebut hendaknya sama-sama saling mamahami dan mengetahui potensi dari kerja sama yang dilakukan tersebut untuk memberikan mamfaat yang lebih, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kerja sama tersebut dapat dicapai secara optimal khususnya dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat. Dan diharapkan kepada masyarakat miskin bisa lebih mandiri dan tidak terlalu mengharapakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa. Akan tetapi, masyarakat hendaknya bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus serupa dapat dihindari di masa depan dan industri kecil di pedesaan dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusti Ayu. Jehem.desa.id. "Implementasi Dan Tantangan Undang-Undang Desa"
<https://jehem.desa.id/index.php/artikel/2018/6/1/implementasi-dan-tantangan-undang-undang-desa>
- Nuribadah, Satriya Nugraha, Fitri Maulina Alviani, Rachmadi Usman, Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Ontran Sumantri Riyanto, Nurhidayati, Naufal Kurniawan.
Researchgate.net. "Hukum Lingkungan"
https://www.researchgate.net/publication/373639184_Hukum_Lingkungan_Pengelolaan_dan_Penegakan_Hukum_Lingkungan_Di_Indonesia
- Shofa Umrotul. Medium.com. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Analisis Kasus Pencemaran Lingkungan PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis"
<https://medium.com/@shofa.umrotul/penegakan-hukum-lingkungan-indonesia-analisis-kasus-pencemaran-lingkungan-pt-sawit-inti-prima-d49def0b7ac3>